

BAB V

KESIMPULAN

Penggunaan pestisida dalam berbagai bentuk sudah ajak sejak 4.500 tahun yang lalu, mulai dari pengendalian hama pada pertanian, kesehatan masyarakat hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari namun, penggunaan tersebut telah menjadi perdebatan dalam beberapa tahun terakhir terkhusus pada ranah domestik maupun internasional. Dalam dua dekade sejak penemuan pertama pestisida pada tahun 1939, menimbulkan sedikit kontroversi di kalangan masyarakat, diisusul dengan keberhasilan penemuan DDT oleh ahli Kimia Swis tahun 1993, Paul Müller, yaitu pada pengendalian nyamuk yang membawa penyakit malaria serta penyakit lainnya yang bersumber dari hewan pada saat Perang Dunia ke –II. Dilanjutkan dengan keberhasilan insektisida dan herbisida dalam menyelamatkan hasil panen dari serangan hama. Menjadikan pestisida terkenal dan disebut-sebut sebagai penyelamat masa depan kehidupan manusia.

The Silent Spring yang ditulis oleh Racel Carson pada tahun 1962, menjadi sangat luar biasa dan dianggap sebagai kontroversi, sebab ia menulis mengenai dampak besar yang dihasilkan oleh pestisida, terutama bagi manusia, lingkungan dan hewan liar. Carson merupakan orang yang pertama kali menyoroti mengenai dampak penggunaan pestisida, yaitu kapasitas pestisida dalam mencemari lingkungan dan satwa yang menjadikan ini sebagai masalah internasional.

Sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an penggunaan dan pendistribusian pestisida meningkat tetapi pada saat yang sama menjadi semakin banyak pertentangan, memimpin munculnya isu-isu lain tentang agenda politik domestik dan internasional. Kekhawatiran mengenai bahaya potensial yang akan muncul dari pestisida juga semakin menguat, upaya untuk mengurangi dan mengontrol penggunaan pestisida kemudian semakin disuarakan (Houge, 1998, p. 1).

Kejadian yang terjadi di Kerala terkait keracunan pestisida menarik perhatian dunia internasional pada tahun

1958, saat 100 orang dinyatakan meninggal akibat pestisida, setelah mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Tidak hanya itu, keracunan pestisida kembali terjadi di Kerala, saat Perusahaan Pertanian Kerala menyemprot pestisida menggunakan pesawat terbang, kontaminasi yang cukup parah juga terjadi disalah satu distrik di Kerala, yang disebut sebagai insiden '*the rice bowl of Kuttanad*' serta masih banyak lain terkait keracunan pestisida, demikian pula dengan kondisi lingkungan di Kerala. Hilangnya serangga, ikan, kodok, hingga burung liar, menjadikan Kerala seperti apa yang di gambarkan Racel Carso. Hingga tahun 2001, akhirnya pemerintah Kerala mulai meninjau ulang undang-undangnya terkait penggunaan dan pendistribusian pestisida, bahkan pemerintahan India pusat juga mengamandemen undang-undang terkait pestisida. Pada tahun 2017, setidaknya Kerala telah melarang dan menghapus penggunaan 20 jenis pestisida dan Kerala juga merupakan negara bagian India yang pertama mengadopsi pertanian organik. Pengawasan terhadap penggunaan, penjualan, pendistribusian, hingga pembuangan limbah dan wadah di Kerala terbilang sangat ketat dan lebih ketat dari pada negara bagian India lainnya. WHO melaporkan bahwa eksternalitas negatif akibat paparan pestisida lebih menonjol di negara berkembang meskipun konsumsinya lebih rendah. Ini menunjukkan adopsi praktik penggunaan tidak ilmiah yang ada di wilayah ini (Devi, Thomas, & Raju, *Pesticide Consumption in India: A Spatiotemporal Analysis*, 2017, p. 171). Ini yang kemudian membuat pemerintah Kerala mau mengikuti prosedur internasional terkait regulasi penggunaan dan pendistribusian pestisida.

Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticide pertama kali diadaptasi oleh FAO pada tahun 1985. Kemudian diubah pada tahun 1989, selanjutnya direvisi kembali secara penuh pada tahun 2002 dan paling akhir diperbaharui pada tahun 2013. Dimana Tata Kelola ini mengedepankan kesehatan manusia dan juga lingkungan terhadap dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida, hingga akhirnya Tata Kelola diubah menjadi *The International*

Code of Conduct on Pesticide Management. Tata Kelola ini diperbaharui berdasarkan Artikel 12, dimana disebutkan bahwa Tata Kelola ini harus diperbaharui berdasarkan hasil pantauan dan *monitoring*, yang mana pembaharuan tersebut sesuai dan mengikuti perubahan tekni, sosial maupun ekonomi. Tata Kelola ini merupakan regulasi pertama yang mendukung ketahanan pangan, kesehatan manusia serta lingkungan. Tata Kelola menetapkan standar sukarela perilaku untuk semua entitas publik dan swasta yang terlibat dalam, atau terkait dengan, distribusi dan penggunaan pestisida, dan sejak adopsi telah berfungsi sebagai standar yang diterima secara global untuk pengelolaan pestisida (FAO, *The Code of Conduct on The Distribution and Use of Pesticide*). Tata Kelola terkait Manajemen Pestisida ini terbukti bermanfaat dan telah diadopsi, setidaknya pada prinsipnya, oleh banyak negara dunia ketiga (Schaeffers, 1996, p. 219). Tata kelola ini efektif dalam menangani masalah penggunaan dan pendistribusian pestisida di Kerala, karena secara keseluruhan telah mengatur terkait penggunaan dan pendistribusian pestisida. Tata Kelola ini telah mengalami empat kali pembaharuan, yang mana pembaharuan tersebut semakin memberikan kejelasan terkait pengelolaan pestisida, sehingga apa yang di sebut William Zartman sebagai *Management School*, atas kejelasan sebuah regulasi, sudah coba diaplikasikan dalam Tata Kelola ini. Gagasan, bahasa serta tujuan dari Tata Kelola ini cukup jelas untuk dapat digunakan oleh berbagai entitas secara efektif. Kejelasan tersebut juga dibuktikan dengan adanya Panduan Teknis (*Technical Guidelines*) yang dikeluarkan oleh FAO dan WHO dalam JMPM, sebagai bentuk penjelasan terkait teknis dalam Tata Kelola tersebut.

Tragedi yang terjadi di Kerala juga menjadi salah satu pertimbangan FAO dan WHO dalam melakukan revisi ataupun pembaharuan terkait Tata Kelola tersebut, yang disampaikan dalam *FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Management*. Meskipun India merupakan salah satu pendiri FAO, dan sudah ada regulasi yang menangani masalah

pestisida, pada kenyataannya tidak digunakan secara efektif di negara bagian India lainnya. Oleh karena itu pemerintah Kerala melakukan inisiatif melalui undang-undang pemerintah terkait pestisida melalui Kebijakan Pertanian Organik. Pemulihan kondisi lingkungan, perawatan korban akibat pestisida, penyuluhan, pendidikan terkait teknis penggunaan pestisida, hingga promosi tanaman organik yang dilakukan pemerintah Kerala dibantu oleh PAN, Croplife serta Universitas Pertanian Kerala. PAN, Croplife dan Universitas Pertanian Kerala, juga membantu implementasi serta *monitoring The International Code of Conduct on Pesticide Management*. Hal tersebut juga menjadi salah satu acuan dalam pembaharuan Tata Kelola terkait Manajemen Pestisida.

Sebagaimana yang disampaikan dalam Tata Kelola tersebut dalam setiap Artikel bahwa, seluruh organisasi internasional, pemerintah maupun lembaga terkait harus memperhatikan setiap aturan yang ada di dalam Tata Kelola. Hal ini juga yang menjadi fokus dalam *update* pada tahun 2013, dimana dalam pembaharuan terbaru ini ditekankan terkait proses manajemen yang lebih baik mulai dari produksi hingga pembuangan yang merupakan kewajiban setiap orang. Tata Kelola ini juga menjadi acuan dalam beberapa konvensi internasional, terutama yang bersinggungan dengan ketahanan pangan, lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan adanya pembaharuan Tata Kelola ini, diharapkan banyak negara yang semakin serius dalam menangani masalah pestisida, selain pemerintah, kelompok-kelompok kecil masyarakat juga harus turut dalam implementasinya. Meskipun, di Kerala jumlah korban sudah mulai berkurang, tingkat residu sudah sangat drastis menurun, bukan berarti kemudian pemerintah berhenti untuk menangani masalah tersebut.